



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FIRDAUS HM.
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 61138

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.763.000.000

1. Tanah Seluas 10000 m2 di NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/52 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 220 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/270 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 373.000.000

1. MOBIL, ISUZU MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
3. MOTOR, HONDA SPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 76.708.207**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.212.708.207

**III. HUTANG** Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.212.708.207

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.